

HUBUNGAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI BALI

I Dewa Gede Yogi Sentana Kartika, Aris Subagiyo, Wisnu Sasongko

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya
Jalan Mayjen Haryono 167 Malang 65145 -Telp (0341)567886
E-mail: yogisentanakartika@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu isu penting di Provinsi Bali dengan perkembangan pariwisatanya yang pesat. Sehingga, penanganan kemiskinan menjadi salah satu dasar penyusunan Kebijakan Provinsi Bali. Oleh karena itu, dilakukan kajian dengan tujuan menganalisis hubungan pengembangan pariwisata dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis isi, analisis tabulasi silang, dan korelasi Spearman. Dari hasil analisis isi kebijakan, hasil analisis tabulasi silang, dan hasil analisis korelasi Spearman terdapat hubungan antara pengembangan pariwisata dengan upaya pengentasan kemiskinan. Dilihat dari hasil analisis tabulasi silang terdapat 10 hubungan antara pariwisata dan kemiskinan yaitu: hubungan P_2 (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan) dengan K_4 (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita), hubungan P_3 (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi) dengan K_4 (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita), hubungan P_4 (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan) dengan K_3 (Peningkatan Jumlah Pengangguran), hubungan P_5 (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) dengan K_1 (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja), K_7 (Peningkatan Indeks Gini), dan K_{10} (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat), hubungan P_6 (Peningkatan Jumlah Daya Tarik Wisata) dengan K_4 (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita), serta hubungan P_{11} (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dengan K_1 (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja), K_4 (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita), K_7 (Peningkatan Indeks Gini), dan K_{10} (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat).

Kata Kunci: kemiskinan, pariwisata, analisis isi, analisis tabulasi silang, analisis korelasi Spearman.

ABSTRACT

The problem of poverty became one of the important issues in Bali with the rapid development of tourism. Thus, addressing poverty became one of the basic preparation of the Bali Provincial Policy. Therefore, conducted a study with the aim of analyzing the relationship of tourism development in poverty alleviation in the province of Bali. This research used quantitative method with content analysis, cross tabulation analysis, and Spearman correlation. Based on the result of content analysis, cross tabulation analysis, and Spearman correlation, the development of tourism had correlation with poverty alleviation efforts. There are 10 relations between tourism and poverty, namely: the relationship P_2 (Increase GDP Business Sector Transportation and Warehousing) with K_4 (Increase Number of regional GDP per capita), the relationship P_3 (Increase GDP Business Sector Information and Communication) with K_4 (Increase Total GRDP per capita), the relationship P_4 (Increase GDP Business Sector Industrial Manufacturing) to K_3 (Increase in Unemployment), the relationship P_5 (Increase the number of tourist arrivals) with K_1 (Increased Number of Labor), K_7 (Increase of Gini Indeks), and K_{10} (Increase Number of Healthy House), the relationship P_6 (Increase Number Travel Attractions) with K_4 (Increase Number of regional GDP per capita), and the relationship of P_{11} (Increase Number Transport mode) with K_1 (Increased Number of Labor), K_4 (Increased Number of regional GDP per capita), K_7 (Increase of Gini Indeks), and K_{10} (Increase Number of Home Health).

Keywords: poverty, tourism, content analysis, crosstabs, Spearman correlation.

PENDAHULUAN

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia bertujuan untuk penghapusan kemiskinan (*poverty alleviation*), pembangunan berkesinambungan (*sustainable development*), serta peningkatan ekonomi dan industri

(Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI, 2005). Hal tersebut, sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sektor

pariwisata sebagai potensi andalan dan unggulan diharapkan memberikan dampak yang signifikan bagi suatu daerah, khususnya Indonesia yang sudah dikenal dengan beragam pariwisatanya, mulai dari wisata sejarah, wisata alam, maupun wisata religi. Dalam UU No. 10 Tahun 2009 juga dijelaskan tujuan kepariwisataan itu adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, dan mengatasi pengangguran. Sejalan dengan hal tersebut, sektor industri pariwisata di Indonesia sudah menjadi salah satu bagian penting dalam menyumbang devisa negara. Menurut data ranking devisa pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tahun 2014, sektor industri pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar ke-5 di Indonesia dari tahun 2012-2014.

Salah satu pulau yang menjadi tujuan wisata di Indonesia adalah Pulau Bali atau Provinsi Bali, yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata. Provinsi Bali adalah pulau terbaik nomor 6 di dunia pada tahun 2013 dan nomor 5 di dunia pada tahun 2014. Selain itu, Bali menjadi pulau terbaik se-Asia tahun 2014 menurut Majalah Travel+Leisure tahun 2014.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali dari tahun 2012-2014 terjadi peningkatan, di mana pada tahun 2012 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 9,9 juta wisatawan dan pada tahun 2014 meningkat menjadi sebanyak 13,1 juta wisatawan atau mengalami peningkatan sebesar 9,68%. Hal tersebut menjadikan sektor Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum sebagai penyumbang terbesar dengan persentase sebesar 21,77% dari 17 sektor yang ada di dalam PDRB Provinsi Bali menurut data dari BPS Provinsi Bali. Sumbangan dari sektor Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum terhadap PDRB Provinsi Bali, menunjukkan bahwa pariwisata menjadi kegiatan utama dan sektor unggulan di Provinsi Bali.

Walaupun pariwisata di Provinsi Bali mengalami perkembangan yang sangat pesat, Provinsi Bali masih memiliki permasalahan kemiskinan yang belum teratasi. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali dari tahun 2012-2014 mengalami peningkatan sebesar 6,89%, di mana pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin sebanyak 158,9 ribu jiwa dan meningkat menjadi sebanyak 196 ribu jiwa pada tahun 2014.

Pengembangan pariwisata di Bali diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, sesuai dengan tujuan Kepariwisata Budaya Bali yang tertuang dalam Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, di mana tujuan kepariwisataan budaya Bali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kesempatan berusaha, dan menciptakan lapangan kerja.

Menurut pendapat para ahli (Rai Utama; 2011, Yoeti; 1980:9-12, dan Warpani; 2007:79) menyatakan bahwa pariwisata akan mampu membuka lapangan kerja, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat, penyebaran aktivitas ekonomi, membantu pemerataan pendapatan penduduk, serta memberdayakan masyarakat, sehingga pengentasan kemiskinan dapat terwujud.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis kebijakan terkait pariwisata dan kemiskinan, serta melihat hubungan pengembangan pariwisata dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali. Metode pengumpulan data menggunakan studi literatur/pustaka dan survei instansi.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan yaitu analisis isi (*content analysis*), analisis tabulasi silang (*crosstabs*), dan analisis korelasi Spearman (*Spearman correlation*).

A. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Menurut Holsti (1969:14) dalam Eriyanto (2011:15) bahwa analisis isi bisa digunakan untuk menganalisis kebijakan. Pada penelitian ini analisis isi digunakan untuk menganalisis kebijakan secara deskriptif, yaitu melihat 10 prinsip untuk mengejar pengentasan kemiskinan melalui pariwisata di Provinsi Bali, yaitu: aspek dan jenis pariwisata, pemerintah, daya saing, peduli, pengelolaan destinasi, pengelolaan pendapatan, partisipasi masyarakat, dampak, akses masyarakat, serta monitor dampak dengan kebijakan UU, Perda, RTRW, RPJPD, dan RPJMD.

B. Analisis Tabulasi Silang (Crosstabs) dan Analisis Korelasi Spearman (Spearman Correlation)

Menurut Indriatno dan Irwinsyah (1997:49) analisis tabulasi silang (crosstabs) adalah metode analisis data yang menggunakan data nominal, ordinal, interval, serta kombinasi diantaranya. Sedangkan koefisien korelasi Spearman digunakan untuk pengukuran statistik non-parametrik ordinal (Djarwanto, 2009). Pada penelitian ini, analisis tersebut digunakan untuk melihat hubungan pengembangan pariwisata dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Provinsi Bali

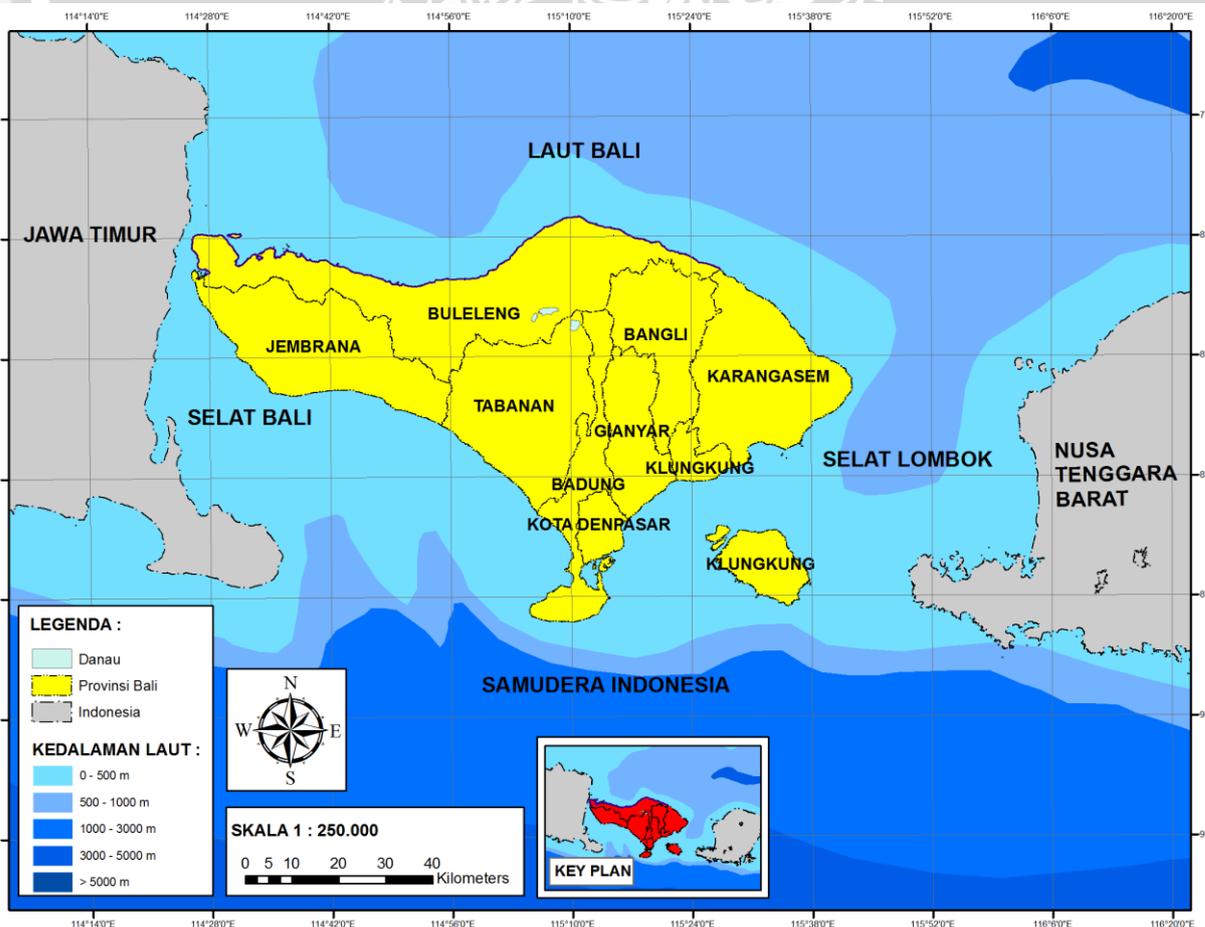
1. Gambaran Umum Provinsi Bali

Ruang lingkup wilayah yang dijadikan objek dalam penelitian adalah Provinsi Bali. Provinsi Bali merupakan salah satu dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Bali dengan Ibu Kotanya Denpasar, terdiri dari Pulau

Bali, Pulau Nusa Penida serta beberapa Pulau-pulau kecil lainnya memiliki luas wilayah 5.636,66 km² dengan panjang pantai mencapai 529 km. Provinsi Bali terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota, 55 kecamatan dan 701 desa/kelurahan, 3.563 banjar/dusun/lingkungan. Provinsi Bali berada pada posisi 8°3'40" dan 8°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" dan 115°42'40" Bujur Timur, dengan batas administrasi (**Gambar 1.**):

1. Sebelah Utara : Laut Bali;
2. Selatan Selatan: Selat Lombok (Provinsi Nusa Tenggara Barat);
3. Sebelah Barat : Samudera Indonesia; Dan
4. Sebelah Timur : Selat Bali (Provinsi Jawa Timur).

Pulau Bali memiliki letak yang sangat strategis, karena menghubungkan lalu lintas laut dan darat antara Pulau Jawa dengan Nusa Tenggara. Jumlah penduduk Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai 4.104.900 jiwa, dengan kepadatan 728 jiwa/km². Mata pencarian penduduk beraneka ragam yang meliputi pekerjaan sebagai petani, pengerajin,



Gambar 1. Peta Orientasi Provinsi Bali



pedagang dan berbagai jasa khususnya bidang kepariwisataan.

B. Analisis Isi (*Content Anlysis*) Kebijakan Pengembangan Pariwisata dalam Kaitannya dengan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali

Analisis isi kebijakan pengembangan pariwisata dalam kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali menggunakan variabel sebagai kata kunci (*key words*) untuk membandingkan kesesuaian isi kebijakan yang ada di Provinsi Bali dengan 10 prinsip untuk mengejar pengentasan kemiskinan melalui pariwisata. Hasil analisis isi tersebut yaitu :

1. Tujuan pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, dan mengatasi pengangguran, serta pengembangan industri kecil.
2. Peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat dengan memberikan bantuan dana bagi pariwisata yang dikelola oleh Desa Pekraman atau lembaga tradisional, sehingga mampu mempertahankan kearifan lokal.
3. Daya saing Pemerintah memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata serta produk pariwisata seperti industri kecil yang unggul, sehingga terwujud pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.
4. Peduli (penanaman modal) terlihat dari pendanaan pariwisata yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat. Pendanaan dalam hal pengembangan industri kecil dan menengah, serta pengelolaan usaha perhotelan melalui koperasi masyarakat, sehingga terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal guna membuka kesempatan kerja.
5. Pengelolaan pariwisata diselenggarakan dengan prinsip pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal, sehingga dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
6. Pengelolaan pendapatan dari sektor pariwisata dilakukan dengan mengalokasikan sebagian dana untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya, serta meningkatkan sinergi dan distribusi antar mata rantai pembentuk industri pariwisata, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli daerah.
7. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari hak, arah kebijakan, serta sasaran pembangunan kepariwisataan yang ingin meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan.
8. Dampak (usaha-usaha yang timbul) dari adanya pariwisata adalah tumbuh dan berkembangnya berbagai macam jasa dan usaha skala mikro, kecil, dan menengah, (ekonomi kerakyatan).
9. Masyarakat di sekitar obyek daya tarik wisata mempunyai hak prioritas, serta diberdayakan (kesempatan kerja) menjadi pekerja maupun pengelola pariwisata.
10. Monitor dampak (pengawasan) dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan, sehingga pengembangan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Setelah hasil analisis isi kebijakan pengembangan pariwisata, maka selanjutnya dilihat bagaimana hubungan pengembangan pariwisata terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali.

C. Analisis Tabulasi Silang (*Crosstabs*) dan Korelasi Spearman (*Spearman Correlation*)

Untuk melihat hubungan antara variabel pariwisata dengan variabel kemiskinan dalam penelitian ini digunakan Analisis Tabulasi Silang (*Crosstabs*) dan Analisis Korelasi Spearman (*Spearman Correlation*). Melihat begitu pentingnya peranan sektor Pariwisata bagi Provinsi Bali, jika dilihat dari kontribusi terhadap PDRB 3 tahun terakhir. Serta terdapatnya angka penduduk miskin di Provinsi Bali. Maka, kita dapat melihat hubungan antara pariwisata dengan kemiskinan. Untuk melihat hubungan antara variabel pariwisata dengan variabel kemiskinan dalam penelitian ini dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Hasil Analisis Tabulasi Silang (Crosstabs) dan Korelasi Spearman (Spearman Correlation) untuk Melihat Hubungan antara Pariwisata dengan Kemiskinan di Provinsi Bali

No.	Variabel X	Variabel Y	P. Value (Sig)	Signifikan / Tidak	Nilai Hubungan	Kriteria
1.	Peningkatan Lapangan Usaha Akomodasi, dan Makan Minum	PDRB Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita	0,011	Signifikan	0,866	Korelasi Sempurna
2.	Peningkatan Lapangan Transportasi dan Pergudangan	PDRB Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita	0,011	Signifikan	0,600	Korelasi Sedang
		Garis Kemiskinan per Kapita	0,047	Signifikan	0,661	Korelasi Tinggi
3.	Peningkatan Lapangan Informasi dan Komunikasi	PDRB Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita	0,048	Signifikan	0,925	Korelasi Sempurna
		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,048	Signifikan	0,204	Hampir Tidak Ada Korelasi
4.	Peningkatan Lapangan Industri Pengolahan	PDRB Peningkatan Jumlah Pengangguran	0,034	Signifikan	-0,500	Korelasi Sedang
		Jumlah Tenaga Kerja	0,044	Signifikan	0,306	Korelasi Rendah
5.	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Peningkatan Indeks Gini	0,044	Signifikan	-0,306	Korelasi Rendah
		Jumlah Rumah Sehat	0,025	Signifikan	0,714	Korelasi Tinggi
6.	Peningkatan Daya Tarik Wisata	Jumlah Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita	0,036	Signifikan	0,088	Hampir Tidak Ada Korelasi
7.	Peningkatan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,025	Signifikan	0,663	Korelasi Tinggi
		Jumlah Tenaga Kerja	0,025	Signifikaan	0,714	Korelasi Tinggi
8.	Peningkatan Moda Angkutan	Jumlah Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita	0,036	Signifikaan	0,588	Korelasi Sedang
		Garis Kemiskinan per Kapita	0,011	Signifikaan	0,992	Korelasi Sempurna
		Indeks Gini	0,025	Signifikaan	-0,714	Korelasi Tinggi
		Jumlah Rumah Sehat	0,044	Signifikaan	0,306	Korelasi Rendah
9.	Peningkatan Pusat Perbelanjaan	Jumlah Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin	0,044	Signifikaan	0,306	Korelasi Rendah

Berdasarkan **Tabel 1.** tersebut terlihat bahwa hasil analisis *crosstabs* dan *spearman correlation* dari sekian variabel pariwisata dan variabel kemiskinan hanya ada beberapa variabel yang berhubungan, yaitu :

1. Hubungan antara variabel P_1 (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, dan Makan Minum) dan variabel K_6 (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita) dengan nilai signifikan sebesar 0,016. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel P_1 (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, dan Makan Minum) dengan variabel K_6 (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita) sebesar 0,866, yang menunjukkan adanya korelasi sempurna

dan searah. Jika, P_1 (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, dan Makan Minum) meningkat, maka meningkat pula K_6 (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi, karena semakin meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, dan Makan Minum di Provinsi Bali, menunjukkan perkembangan pariwisata yang begitu pesat. Perkembangan tersebut berdampak kepada meningkatnya biaya hidup, serta meningkatnya penduduk pendatang ke Pulau Bali untuk mengadu nasib dan mencari pekerjaan. Hal tersebut, berimbas kepada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan makan minum, serta perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan di Provinsi Bali (Garis Kemiskinan per Kapita). Hal tersebut

terlihat dari data PDRB Lapangan Usaha Akomodasi, dan Makan Minum Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebesar 36.111.298,8 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 24,79%. Sementara itu, pada tahun 2014 Garis Kemiskinan per Kapita Provinsi Bali sebesar 3.620.964 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 6,24%.

2. Hubungan antara variabel P_2 (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan) dan variabel K_4 (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita) dengan nilai signifikan sebesar 0,011. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel P_2 (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan) dan variabel K_4 (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita) sebesar 0,600, yang menunjukkan adanya korelasi sedang dan searah. Jika, P_2 (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan) meningkat, maka meningkat pula K_4 (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisata berdampak kepada meningkatnya kebutuhan akan transportasi dan pengiriman barang baik berupa barang kerajinan maupun furniture yang dikirim ke luar negeri. Meningkat dan menurunnya PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan berpengaruh terhadap meningkat dan menurunnya pendapatan masyarakat (Jumlah PDRB per Kapita) di Provinsi Bali. Hal tersebut terlihat dari data PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebesar 14.203.195,1 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 25,57%. Sementara itu, pada tahun 2014 PDRB per Kapita Provinsi Bali sebesar 38.112.570 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 15,02%.
3. Hubungan antara variabel P_2 (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan

Pergudangan) dan variabel K_6 (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita) dengan nilai signifikan sebesar 0,047. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel P_2 (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan) dan variabel K_6 (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita) sebesar 0,661, yang menunjukkan adanya korelasi tinggi dan searah. Jika, P_2 (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan) meningkat, maka meningkat pula K_6 (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi, karena semakin meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan di Provinsi Bali, menunjukkan perkembangan pariwisata yang begitu pesat. Perkembangan tersebut berdampak kepada meningkatnya biaya hidup, serta meningkatnya penduduk pendatang ke Pulau Bali untuk mencari kerja. Hal tersebut, berimbas kepada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan makan minum, serta perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan di Provinsi Bali (Garis Kemiskinan per Kapita). Hal tersebut terlihat dari data PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebesar 14.203.195,1 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 25,57%. Sementara itu, pada tahun 2014 Garis Kemiskinan per Kapita Provinsi Bali sebesar 3.620.964 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 6,24%.

4. Hubungan antara variabel P_3 (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi) dan variabel K_4 (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita) dengan nilai signifikan sebesar 0,048. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel P_3 (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi) dan variabel K_4

(Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita) sebesar 0,925, yang menunjukkan adanya korelasi sempurna dan hubungan yang searah. Jika, P_3 (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasin dan Komunikasi) meningkat, maka meningkat pula K_4 (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, pengembangan pariwisata tidak pernah lepas dengan adanya usaha informasi dan komunikasi. Adanya usaha informasi dan komunikasi akan sangat membantu dalam hal promosi pariwisata. Peningkatan usaha informasi dan komunikasi akan berpengaruh kepada peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasin dan Komunikasi, sehingga berdampak kepada peningkatan pendapatan penduduk (PDRB per kapita di Provinsi Bali). Hal tersebut terlihat dari data PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebesar 8.034.798,2 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 9,87%. Sementara itu, pada tahun 2014 PDRB per Kapita Provinsi Bali sebesar 38.112.570 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 15,02%.

5. Hubungan antara variabel P_3 (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi) dan variabel K_9 (Peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)) dengan nilai signifikan sebesar 0,048. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel P_3 (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi) dan variabel K_9 (Peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)) sebesar 0,204, yang menunjukkan hampir tidak ada korelasi dan hubungannya searah. Jika, P_3 (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi) meningkat, maka meningkat pula K_9 (Peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, tidak semua penduduk di Provinsi Bali bekerja di sektor pariwisata atau juga belum semua penduduk dapat merasakan dampak dari

adanya usaha informasi dan komunikasi. Sehingga, peningkatan PDRB lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi tidak berdampak dalam membantu penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Bali. Hal tersebut terlihat dari data PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebesar 8.034.798,2 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 9,87%. Sementara itu, pada tahun 2014 PDRB per Kapita Provinsi Bali sebesar 0,26, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 62,50%.

6. Hubungan antara variabel P_4 (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan) dan variabel K_3 (Peningkatan Jumlah Pengangguran) dengan nilai signifikan sebesar 0,034. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel P_4 (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan) dan variabel K_3 (Peningkatan Jumlah Pengangguran) sebesar - 0,500, yang menunjukkan adanya korelasi sedang dan hubungan yang berlawanan arah. Jika, P_4 (Peningkatan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan) meningkat, maka K_3 (Peningkatan Jumlah Pengangguran) akan mengalami penurunan, demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, adanya pengembangan pariwisata akan berimbas kepada permintaan terhadap barang industri olahan, seperti *handy craft*, makanan minuman, souvenir, dll yang menjadi ciri khas Pulau Bali. Meningkatnya permintaan akan industri olahan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan. Peningkatan tersebut juga berdampak kepada kebutuhan tenaga kerja dibidang industri pengolahan, sehingga hal tersebut berimbas kepada penurunan jumlah pengangguran di Provinsi Bali. Hal tersebut terlihat dari data PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebesar 9.984.338,7 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013

sebesar 15,34%. Sementara itu, pada tahun 2014 jumlah pengangguran di Provinsi Bali sebesar 44.041 jiwa, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 4,90%.

7. Hubungan antara variabel P_5 (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) dan variabel K_1 (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja) dengan nilai signifikan sebesar 0,044. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel P_5 (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) dan variabel K_1 (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja) sebesar 0,306, yang menunjukkan adanya korelasi rendah dan hubungan yang searah. Jika, P_5 (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) meningkat, maka meningkat pula K_1 (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali berdampak kepada meningkatnya permintaan akan jasa-jasa. Meningkatnya permintaan akan jasa-jasa secara otomatis akan mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja yang meningkat. Peningkatan tersebut terjadi agar pelayanan terhadap wisatawan tetap optimal. Hal tersebut terlihat dari data jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebanyak 13.183.242 wisatawan, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 22,06%. Sementara itu, pada tahun 2014 jumlah tenaga kerja di Provinsi Bali sebanyak 2.272.632 jiwa, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 0,33%.
8. Hubungan antara variabel P_5 (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) dan variabel K_7 (Peningkatan Indeks Gini) dengan nilai signifikansi sebesar 0,044. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel P_5 (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) dan variabel K_7 (Peningkatan Indeks Gini) sebesar - 0,306, yang menunjukkan adanya korelasi rendah

dan hubungan yang berlawanan arah. Jika, P_5 (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) meningkat, maka K_7 (Peningkatan Indeks Gini) akan mengalami penurunan, demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali berdampak pada pendapatan penduduk di Provinsi Bali. Peningkatan pendapatan penduduk berdampak pada pemerataan pendapatan penduduk di Provinsi Bali. Semakin menurunnya nilai indeks gini, menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk yang merata. Hal tersebut terlihat dari data jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebanyak 13.183.242 wisatawan, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 22,06%. Sementara itu, pada tahun 2014 nilai indeks gini di Provinsi Bali sebesar 0,415, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 2,97%.

9. Hubungan antara variabel P_5 (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) dan variabel K_{10} (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat) dengan nilai signifikan sebesar 0,025. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Untuk nilai tingkat hubungan antara variabel P_5 (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) dan variabel K_{10} (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat) sebesar 0,714, yang menunjukkan adanya korelasi tinggi dan hubungan yang searah. Jika, P_5 (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan) meningkat, maka meningkat pula K_{10} (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan berdampak kepada peningkatan pemerataan pendapatan penduduk di Provinsi Bali. Sehingga, dengan pemerataan pendapatan tersebut, penduduk di Provinsi Bali mampu menjadikan rumah mereka lebih sehat (peningkatan jumlah rumah sehat). Hal tersebut terlihat dari data jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebanyak

13.183.242 wisatawan, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 22,06%. Sementara itu, pada tahun 2014 jumlah rumah sehat di Provinsi Bali sebanyak 1.114.935 unit, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 19,32%.

10. Hubungan antara variabel P_6 (Peningkatan Jumlah Daya Tarik Wisata) dan variabel K_4 (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita) dengan nilai signifikan sebesar 0,036. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel P_6 (Peningkatan Jumlah Daya Tarik Wisata) dan variabel K_4 (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita) sebesar 0,088, yang menunjukkan hampir tidak ada korelasi dan hubungan yang searah. Jika, P_6 (Peningkatan Jumlah Daya Tarik Wisata) meningkat, maka meningkat pula K_4 (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, meningkatannya jumlah daya tarik wisata di Provinsi Bali berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Provinsi Bali. akan tetapi pengaruhnya sangat kecil. Kecilnya pengaruh dikarenakan penduduk di Provinsi Bali bekerja tidak hanya di sektor pariwisata tetapi juga di 16 sektor lainnya. Masing-masing sektor tersebut berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat atau jumlah PDRB per kapita masyarakat di Provinsi Bali. Hal tersebut terlihat dari data jumlah daya tarik wisata di Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebanyak 297 obyek, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 1,02%. Sementara itu, pada tahun 2014 PDRB per Kapita Provinsi Bali sebesar 38.112.570 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 15,02%.
11. Hubungan antara variabel P_{10} (Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah) dan variabel K_9 (Peningkatan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2)) dengan nilai signifikan sebesar 0,025. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk

nilai tingkat hubungan antara variabel P_{10} (Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah) dan variabel K_9 (Peningkatan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2)) sebesar 0,663, yang menunjukkan adanya korelasi tinggi dan hubungan yang searah. Jika, P_{10} (Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah) meningkat, maka meningkat pula K_9 (Peningkatan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2)), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, jumlah industri kecil dan menengah tidak yang meningkat masih belum mampu memberdayakan jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Bali, karena setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga, tidak memberikan dampak terhadap penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin (Indeks Kearifan Kemiskinan), dapat dilihat dari nilai indeks yang meningkat. Meningkatnya nilai indeks menunjukkan bahwa tingginya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Provinsi Bali. Hal tersebut terlihat dari data jumlah industri kecil dan menengah Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebanyak 39.994 unit, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 2,18%. Sementara itu, pada tahun 2014 nilai indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Bali sebesar 0,26, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 62,50%.

12. Hubungan antara variabel P_{11} (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel K_1 (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja) dengan nilai signifikan sebesar 0,025. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel P_{11} (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel K_1 (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja) sebesar 0,714, yang menunjukkan adanya korelasi tinggi dan hubungan yang searah. Jika, P_{11} (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) meningkat, maka meningkat pula K_1 (Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi

Bali akan mempengaruhi kebutuhan akan moda angkutan. Kebutuhan akan moda angkutan yang meningkat mempengaruhi peningkatan jumlah moda angkutan. Meningkatnya jumlah moda angkutan akan berdampak kepada peningkatan jumlah tenaga kerja di Provinsi Bali. Hal tersebut terlihat dari data jumlah moda angkutan di Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebanyak 286.996 unit, di mana mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar - 2,30%. Sementara itu, pada tahun 2014 jumlah tenaga kerja di Provinsi Bali sebanyak 2.272.632 jiwa, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 0,33%.

13. Hubungan antara variabel P_{11} (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel K_4 (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita) dengan nilai signifikan sebesar 0,036. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel P_{11} (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel K_4 (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita) sebesar 0,588, yang menunjukkan adanya korelasi sedang dan hubungan yang searah. Jika, P_{11} (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) meningkat, maka meningkat pula K_4 (Peningkatan Jumlah PDRB per Kapita), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, peningkatan jumlah moda angkutan adalah dampak dari kebutuhan akan moda angkutan yang meningkat. Jumlah moda angkutan yang meningkat berpengaruh kepada peningkatan jumlah tenaga kerja. Semakin banyak penduduk di Provinsi Bali yang bekerja, maka meningkat pula pendapatan (jumlah PDRB per Kapita) penduduk di Provinsi Bali. Hal tersebut terlihat dari data jumlah moda angkutan di Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebanyak 286.996 unit, di mana mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar - 2,30%. Sementara itu, pada tahun 2014 PDRB per Kapita Provinsi Bali sebesar 38.112.570 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 15,02%.
14. Hubungan antara variabel P_{11} (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel K_6 (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita) dengan nilai signifikan sebesar 0,011. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel P_{11} (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel K_6 (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita) sebesar 0,992, yang menunjukkan adanya korelasi sempurna dan hubungan yang searah. Jika, P_{11} (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) meningkat, maka meningkat pula K_6 (Peningkatan Garis Kemiskinan per Kapita), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, dampak dari adanya peningkatan jumlah moda angkutan tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh semua penduduk di Provinsi Bali. Sehingga, penduduk miskin yang tidak memiliki kemampuan di bidang moda angkutan, tetap mengalami kemiskinan, bahkan mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari data jumlah moda angkutan di Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebanyak 286.996 unit, di mana mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar - 2,30%. Sementara itu, pada tahun 2014 Garis Kemiskinan per Kapita Provinsi Bali sebesar 3.620.964 (juta rupiah), di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 6,24%.
15. Hubungan antara variabel P_{11} (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel K_7 (Peningkatan Indeks Gini) dengan nilai signifikan sebesar 0,025. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel P_{11} (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel K_7 (Peningkatan Indeks Gini) sebesar - 0,714, yang menunjukkan adanya korelasi tinggi dan hubungan yang berlawanan arah. Jika, P_{11} (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) meningkat, maka K_7 (Peningkatan Indeks Gini) akan mengalami penurunan, demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, peningkatan jumlah moda angkutan di Provinsi Bali berdampak pada kesempatan kerja penduduk di Provinsi Bali. Banyaknya penduduk yang bekerja,

sehingga terjadi pemerataan pendapatan penduduk di Provinsi Bali. Semakin menurunnya nilai indeks gini, menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk yang menuju merata. Hal tersebut terlihat dari data jumlah moda angkutan di Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebanyak 286.996 unit, di mana mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar - 2,30%. Sementara itu, pada tahun 2014 nilai indeks gini di Provinsi Bali sebesar 0,415, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 2,97%.

16. Hubungan antara variabel P_{11} (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel K_{10} (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat) dengan nilai signifikan sebesar 0,044. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan antara variabel P_{11} (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) dan variabel K_{10} (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat) sebesar 0,306, yang menunjukkan adanya korelasi rendah dan hubungan yang searah. Jika, P_{11} (Peningkatan Jumlah Moda Angkutan) meningkat, maka meningkat pula K_{10} (Peningkatan Jumlah Rumah Sehat), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, peningkatan jumlah moda angkutan berdampak kepada peningkatan jumlah kesempatan kerja bagi penduduk di Provinsi Bali. Sehingga, dengan adanya kesempatan kerja bagi penduduk, maka jumlah tenaga kerja di Provinsi Bali menjadi meningkat, dengan meningkatnya tenaga kerja, maka pendapatan penduduk akan meningkat. Sehingga, penduduk di Provinsi Bali mampu menjadikan rumah mereka lebih sehat (peningkatan jumlah rumah sehat). Hal tersebut terlihat dari data jumlah moda angkutan di Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebanyak 286.996 unit, di mana mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar - 2,30%. Sementara itu, pada tahun 2014 jumlah rumah sehat di Provinsi Bali sebanyak 1.114.935 unit, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 19,32%.
17. Hubungan antara variabel P_{13} (Peningkatan Jumlah Pusat Perbelanjaan)

dan variabel K_2 (Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin) dengan nilai signifikan sebesar 0,044. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan. Sementara itu, untuk nilai tingkat hubungan variabel P_{13} (Peningkatan Jumlah Pusat Perbelanjaan) dan variabel K_2 (Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin) sebesar 0,306, yang menunjukkan adanya korelasi rendah dan searah. Jika, P_{13} (Peningkatan Jumlah Pusat Perbelanjaan) meningkat, maka meningkat pula K_2 (Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin), demikian juga dapat terjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena, meningkatnya jumlah pusat perbelanjaan dapat mengurangi pendapat penduduk yang mata pencahariannya sebagai pedagang dengan modal yang kecil. Namun, dampak yang ditimbulkan tidak begitu besar bagi pedagang dengan modal yang kuat. Sehingga pengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali sangat kecil. Hal tersebut terlihat dari data jumlah pusat perbelanjaan di Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebanyak 11.252 unit, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 3,44%. Sementara itu, pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 196.203 jiwa, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 7,34%.

KESIMPULAN

Melalui hasil dan pembahasan dari penelitian berjudul Pengaruh Pengembangan Pariwisata dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali, yang dianalisis menggunakan Analisis Isi (*Content Analysis*), serta Analisis Tabulasi Silang (*Crosstabs*) dan Analisis Korelasi Spearman (*Spearman correlation*). Terbatas pada ruang lingkup penelitian maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil Analisis Isi (*Content Analysis*) dari kebijakan dan peraturan mengenai pengembangan pariwisata di Provinsi Bali dapat diketahui bahwa pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan dengan tegas mengupayakan pengentasan kemiskinan melalui pengembangan pariwisata di desa-

desa maupun di wilayah pesisir yang memiliki potensi wisata, meningkatkan daya saing dengan melakukan promosi wisata serta mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja dan penduduk di sekitar destinasi wisata, mengharapkan semua komponen pariwisata melibatkan masyarakat lokal, peningkatan sarana dan prasarana pariwisata, menekankan tujuan pengelolaan destinasi pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan meningkatkan ekonomi masyarakat, pengelolaan pendapatan didistribusikan secara merata, masyarakat mendapatkan kesempatan (akses masyarakat) untuk bekerja di sektor pariwisata, serta pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan (monitor dampak) dalam usaha pengembangan pariwisata dengan tujuan pengentasan kemiskinan dapat tercapai.

2. Berdasarkan hasil Analisis Tabulasi Silang (*Crosstabs*) dan Analisis Korelasi Spearman (*Spearman Correlation*) dapat diketahui bahwa pengembangan pariwisata berhubungan dengan upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali, serta pengembangan pariwisata berdampak kepada pengentasan kemiskinan. Terlihat dari variabel-variabel yang berhubungan, tetapi hubungan tersebut tidak terlalu signifikan. Hal tersebut terjadi karena, selain pariwisata terdapat sektor-sektor lain yang mempengaruhi upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali.

Dari hasil *content analysis*, serta *crosstabs*, dan *Spearman correlation analysis* dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara pengembangan pariwisata dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali, jika pariwisata dikembangkan dengan baik. Namun, untuk pengentasan kemiskinan yang optimal perlu memperhatikan sektor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Depbudpar. 2005. Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Nasional 2005-2009.
- Djarwanto, PS. 2009. *Statistic Nonparametrik*. Yogyakarta: BPFE.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Indriatno, Imam dan Irwingsyah, R. 1998. *Aplikasi Analisis Tabulasi Silang (Crosstab) dalam Perencanaan Wilayah dan Kota*. Bandung: Unisba press
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Utama, Rai. 2011. *Dimensi Ekonomi Pariwisata: Kajian Terhadap Dampak Ekonomi dan Refleksi Dampak Pariwisata Terhadap Pembangunan Ekonomi Provinsi Bali*. Tesis. Denpasar : Universitas Udayana
- Warpani, Suwardjoko P. 2007. *Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB.
- Yoeti, Oka A. 1996. *Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Angkasa.